

Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bogor

Tantri Puspitasari^{1*}, Muhammad As'ad²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹tantripuspitasari84@gmail.com, ²muhammad.asad@stiami.ac.id

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci
Implementasi Kebijakan;
Bantuan Keuangan;
Pendidikan Politik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor. Bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Bogor mengalami kenaikan dan perlu dilihat implementasi kebijakan dari nilai bantuan yang telah ditetapkan. Fokus penelitian diarahkan pada empat variabel utama implementasi kebijakan menurut teori George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait, seperti Kesbangpol, DPRD, dan pengurus partai politik penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik berjalan cukup baik. Komunikasi berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki mendukung untuk implementasi kebijakan, sikap yang dimiliki partai berkomitmen dalam penggunaan bantuan keuangan sesuai ketentuan dan struktur birokrasi yang memudahkan implementasi kebijakan. Namun masih perlunya peningkatan kapasitas pelaksana pada partai politik, serta penguatan koordinasi dan evaluasi yang dilakukan oleh Kesbangpol Kota Bogor untuk mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

PENDAHULUAN

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk Pendidikan. Dalam mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat Kota Bogor melalui pendidikan politik masih terjadi kendala diantaranya seperti: Kecenderungan dalam generasi muda saat yang kurang peduli dan cenderung apatis terhadap proses politik atau perkembangan politik di Indonesia khususnya di Kota Bogor. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti: (1) partai politik

belum dapat mengoptimalkan fungsi-fungsinya sebagai lembaga politik khususnya dalam hal melaksanakan pendidikan politik; (2) pendidikan politik belum dilaksanakan secara optimal.

Pemerintah Kota Bogor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menganggarkan bantuan keuangan kepada partai politik dengan besaran nilai suara sah sebesar Rp2.275,81 per suara sah. Jumlah keseluruhan anggaran yang dialokasikan untuk partai politik yang menerima bantuan keuangan oleh Pemerintah Kota Bogor sejumlah Rp1.247.154.687 sebagai anggaran yang bersifat mandatory. Namun demikian, besaran nilai bantuan yang telah ditetapkan tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan operasional dan pelaksanaan fungsi partai politik saat ini. Adanya kebijakan kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik juga berasal dari usulan partai politik di Kota Bogor untuk meningkatkan nilai bantuan keuangan kepada partai politik.

Nilai bantuan yang diberikan dari tahun 2014-2022 sebesar Rp2.275,818 per suara sah.

Kemudian berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor pada tahun 2022 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2017 bahwa nilai bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor dapat diberikan berada pada kisaran Rp6.006,852 – Rp7.951,273 per suara sah.

Perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kota Bogor pada tahun 2021 termasuk dalam kategori tinggi yaitu berada pada 1,808 poin yang mengacu pada PMK No. 116 Tahun 2021. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kota Bogor tersebut kemudian disandingkan dengan nilai bantuan keuangan kepada partai politik di kota-kota lain di Jawa Barat. Dengan demikian, penelitian ini menarik untuk diteliti dalam implementasi kebijakan kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik dan dampaknya terhadap optimalisasi pendidikan politik kepada anggota partai dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya (Murdiyanto, 2020). Penelitian ini bersifat kualitatif sebab implementasi kebijakan bantuan keuangan merupakan penelitian yang terkait antara sumber daya manusia serta ketentuan yang perlu dipahami secara mendalam pada aktor-aktor terkait.

Penelitian ini juga menggunakan informan untuk melengkapi informasi-informasi yang dibutuhkan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bogor, Pengurus Partai DPD PAN Kota

Bogor, Pengurus Partai DPC PDIP Kota Bogor dan Pengurus Partai DPD NasDem Kota Bogor. Penentuan informan ditentukan dengan teknik purposive sampling.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling tertegis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi observasi, wawancara dan dokumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bogor

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh seluruh indikator yang menjadi bagian dalam suksesnya suatu kebijakan, Sebagaimana pendapat George Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik jika di dalam proses implementasi tersebut terjalin komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang baik juga. Adapun pembahasan mengenai implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik di badan kesatuan bangsa dan politik kota bogor yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi antara Badan Kesbangpol Kota Bogor, Komisi I DPRD Kota Bogor, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terjalin secara sinergis. Hal ini ditunjukkan dari kebijakan kenaikan bantuan keuangan yang merupakan hasil inisiatif DPRD dan kemudian difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh Kesbangpol, pada akhirnya mendapatkan persetujuan dari pemerintah provinsi. Selain itu, partai politik juga mengonfirmasi bahwa komunikasi dengan pihak Kesbangpol berjalan baik, terutama dalam forum-forum pertemuan formal seperti rapat kerja.

Dalam komunikasi kebijakan terdapat dimensi transformasi informasi (transmisi), yang mengharuskan kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi yang terbangun dalam proses implementasi kebijakan kenaikan bantuan keuangan pada Badan Kesbangpol Kota Bogor telah berjalan demikian, sehingga kebijakan dapat berjalan dengan efektif.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh para *stakeholder* kompeten dan memiliki anggaran yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan pegawai Badan Kesbangpol Kota Bogor dalam menyusun kajian kebijakan secara mandiri dan keberhasilan dalam mengelola anggaran kenaikan bantuan tanpa hambatan dalam dua tahun terakhir. Di sisi lain, kesiapan partai politik sebagai penerima bantuan juga menjadi bagian integral dari keberhasilan implementasi kebijakan ini. Partai-partai politik besar di Kota Bogor, seperti PDI Perjuangan, PAN, dan NasDem, menunjukkan kesiapan baik secara struktural maupun administratif. Mereka tidak hanya mampu menyerap dana bantuan secara akuntabel, tetapi juga telah menjadikannya sebagai instrumen untuk memperluas pendidikan politik di tingkat akar rumput.

c. Sikap

Sikap dan komitmen *stakeholder* menunjukkan bahwa seluruh pihak memiliki kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik. Kepala Badan Kesbangpol Kota Bogor secara eksplisit menyampaikan dukungannya terhadap kenaikan bantuan keuangan karena diyakini akan meningkatkan intensitas pendidikan politik dan memperkuat kualitas demokrasi. Bentuk dukungan konkret ditunjukkan melalui pelaksanaan bimbingan teknis rutin kepada partai politik, terutama menjelang proses pencairan dan pelaporan. Partai politik pun merespons secara positif kebijakan ini, baik dalam aspek normatif maupun praktis. Pernyataan para pengurus DPC/DPD menunjukkan adanya pemahaman bahwa dana bantuan harus digunakan sesuai peruntukannya, dengan prioritas pada pendidikan politik dan operasional kelembagaan.

d. Struktur Birokrasi

Mekanisme pencairan bantuan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bogor dinilai telah mempermudah proses administratif. Pengurus partai menyatakan bahwa pencairan dilakukan dengan baik dan komunikatif antara partai politik dengan Badan Kesbangpol Kota Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang dibangun relatif sederhana, jelas, dan adaptif terhadap kebutuhan *stakeholder*.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Terdapat hambatan yang diidentifikasi dalam implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik di badan kesatuan bangsa dan politik kota bogor, diantaranya yaitu: (1) terdapat kekurangan kualifikasi SDM yang mengelola bantuan keuangan kepada partai politik di partai politik dan pemerintah daerah. (2) komunikasi yang belum berjalan dengan baik diakibatkan penyampaian informasi yang bersifat mendadak dan tidak menyeluruh. (3) kendala struktur birokrasi yang menyebabkan keterlambatan pencairan bantuan keuangan serta bimbingan teknis masih bersifat seremonial dan belum menyentuh aspek pendampingan rutin.

Upaya dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Dalam merespons berbagai hambatan tersebut, baik dari pihak pemerintah daerah maupun partai politik, harus dilakukan sejumlah upaya yang bersifat adaptif dan kolaboratif. Badan Kesbangpol Kota Bogor perlu melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mengurangi dampak keterlambatan pencairan dana bantuan keuangan, diantaranya yaitu: (1) mendorong partai politik untuk menyiapkan seluruh dokumen persyaratan sejak awal tahun anggaran. (2) komitmen pengurus partai politik dalam menghadapi kendala seperti keterlambatan pencairan yaitu dengan menggunakan dana talangan internal untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik.

KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik di badan kesatuan bangsa dan politik kota bogor menunjukkan bahwa Komunikasi yang terjalin dengan baik antara tiap stakeholder, sumber daya yang mumpuni untuk melaksanakan bantuan keuangan baik di partai politik maupun di unit ker, Sikap dalam bentuk komitmen yang kuat dari partai politik untuk

- menjalankan fungsi pendidikan politik melalui pemanfaatan bantuan keuangan, serta struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan. Namun meskipun begitu, implementasi kebijakan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan yang perlu ditangani, diantara lain yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dan struktur birokrasi yang ada
2. Faktor yang menghambat implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik di badan kesatuan bangsa dan politik kota bogor keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memiliki pelatihan teknis yang dibutuhkan, ketidakjelasan dalam item penggunaan anggaran oleh partai politik, proses pencairan dana yang bergantung pada waktu terbitnya LHP dari BPK, serta terbatasnya intensitas bimbingan teknis yang diberikan oleh Kesbangpol.
 3. Strategi dalam menghadapi hambatan yang ada yaitu dengan memberikan pelatihan teknis kepada pengurus partai politik terkait bantuan keuangan dan mendorong partai politik untuk menyiapkan seluruh dokumen persyaratan sejak awal tahun anggaran untuk keperluan pencairan bantuan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

- Ayomi, T. L. 2024. Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Oleh Dewan Pimpinan Cabang Pdi Perjuangan Kota Depok Tahun 2021-2023. Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama): Jakarta.
- Budiardjo, M. 2005. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Budiyono. 2016. Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014. Masters thesis, Universitas Terbuka.
- Contoh Proposal. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press.
- Edwards, G. C. 1980. Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press: Washington, D.C.
- Imelda, I & Nofianti, L. 2023. Implementasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik). Jurnal Thengkyang.
- Kirana, P. A. 2024. Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Di Kota Denpasar. Undiknas Graduate School: Denpasar.
- Lawing, K. 2023. Analisis Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kutai Barat. Journal of Geopolitics and Public Policy.
- Lestari, N. P. dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Jurnal Pendidikan dan Konseling.
- Malawat, S. H. 2022. Pengantar Administrasi Publik. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary: Banjarmasin.
- Murdiyanto, M. 2020. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi disertai
- Nurhasim, M. 2024. Banpol dan Pengaruhnya Bagi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Parpol. Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Roring, A, D, dkk. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Governance.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Supriyanto, D & Wulandari, L. 2012. Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan

-
- Besaran, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pengelolaan. Yayasan Perludem.
- Surbakti, R. 2010. Memahami Ilmu Politik. Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.
- Syakila, Rattu Nadra & Siswanto. 2020. Implementasi Kebijakan Proses Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan. Undergraduate Thesis, Sriwijaya University.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Penerbit Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP): Bandung.
- Tangkere, G. M. dkk. 2021. Efektifitas Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Politik (Studi Kasus Partai Golongan Karya Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018). Universitas Sam Ratulangi.
- Turhindayani. 2016. Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Wirata, dkk. 2024. Administrasi Publik. Media Penerbit Indonesia.